

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR PANDE ARTHA DEWATA
TAHUN 2025**



**JL. DIPONEGORO NO. 162 DENPASAR
TELEPON: (0361) 223740 Fax. (0361) 264236**

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT. BPR PANDE ARTHA DEWATA
Alamat	Jln. Diponegoro No. 162 Denpasar, Bali
Nomor Telepon	(0361) 223740

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) merupakan pilar krusial untuk menjaga kepercayaan nasabah, memastikan operasional yang sehat, dan memenuhi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Pande Artha Dewata pada tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang sebelumnya pulih.

BPR Pande memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK sehingga BPR Pande dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Denpasar dan Bali pada umumnya. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Pande didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT. BPR Pande Artha Dewata.

BPR Pande telah beroperasi lebih dari 20 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu sebagai penyedia jasa keuangan profesional yang memberikan nilai positif yang artinya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa perbankan seperti penerimaan tabungan, deposito dan terutama menyediakan dana berupa kredit dengan proses yang cepat.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Pande selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, BPR Pande terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2. Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	I Ketut Wijana, SE
	Jabatan	Direktur Utama
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. g. Mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan konsumen, seperti risiko informasi yang menyesatkan atau penyalahgunaan data nasabah.		
2.	Nama	I Kadek Edi Suprpta, SE
	Jabatan	Direktur YMF Kepatuhan
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Direktur YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut: a. Menyusun program untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan bagi seluruh pegawai. b. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain d. Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari ketentuan e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain		

- f. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.
- g. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan
- h. Mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan konsumen, seperti risiko informasi yang menyesatkan atau penyalahgunaan data nasabah.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan secara umum dalam posisi sehat, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan.
- d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti walaupun masih ada satu komitmen yang belum diselesaikan (dalam proses penyelesaian)
- f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- g. Memastikan BPR mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan konsumen, seperti risiko informasi yang menyesatkan atau penyalahgunaan data nasabah.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Ni Luh Winari, SE
	Jabatan	Komisaris Utama
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut: a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional Bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris. f. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam mematuhi seluruh ketentuan perlindungan konsumen.		

g. Memastikan BPR mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan konsumen, seperti risiko informasi yang menyesatkan atau penyalahgunaan data nasabah.

2.	Nama	I Nyoman Kus Eka Jaya, SE
	Jabatan	Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank
- c. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas (Otoritas Jasa Keuangan) dan Instansi lainnya.
- e. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam mematuhi seluruh ketentuan perlindungan konsumen
- f. Memastikan BPR mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan konsumen, seperti risiko informasi yang menyesatkan atau penyalahgunaan data nasabah.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2025.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.
- h. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan tanggung jawab Direksi dalam mematuhi seluruh ketentuan perlindungan konsumen
- i. Memastikan BPR mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dari interaksi dengan konsumen, seperti risiko informasi yang menyesatkan atau penyalahgunaan data nasabah.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Tidak memiliki Satuan Kerja Komite

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Tidak memiliki Satuan Kerja Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Ketut Wijana, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Kadek Edi Suprpta, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Nyoman Kus Eka Jaya, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	33,95
2.	Nama	Ni Luh Winari, SE
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	I Ketut Wijana, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I Kadek Edi Suprpta, SE

	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Ni Luh Winari, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I Nyoman Kus Eka Jaya, SE
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Tidak ada kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	I Ketut Wijana, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Kadek Edi Suprpta, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Ni Luh Winari, SE
----	------	-------------------

	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Nyoman Kus Eka Jaya, SE
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak ada kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Ketut Wijana, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Kadek Edi Suprpta, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Ni Luh Winari, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada

	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Nyoman Kus Eka Jaya, SE
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi tidak ada hubungan keuangan baik itu dengan anggota direksi lain, dewan komisaris maupun dengan pemegang saham
 Anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan dengan anggota komisaris lain di BPR Pande

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	I Ketut Wijana, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Kadek Edi Suprpta, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Ni Luh Winari, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Nyoman Kus Eka Jaya, SE
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	I Wayan Rastika - Saudara Kandung

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan anggota direksi lain, dewan komisaris maupun dengan pemegang saham
 Komisaris (I Nyoman Kus Eka Jaya, SE) merupakan adik kandung dari pemegang saham pengendali (I Wayan Rastika)

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp198.136.041
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp69.916.963

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp17.000.000

Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp6.575.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
---------------------------------------	-----

Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
---	---------

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0
---	-----

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
--	-----

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0
--	-----

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
--	-----

Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0
--	-----

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
--	---------

Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Remunerisasi selama 1 (satu) Tahun di Tahun 2025

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	2,94 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,14 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,08 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	3,83 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	1,13 : 1

Rasio Gaji adalah selama 1 tahun di tahun 2025

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	17 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2024	

	2. Strategi dan progres penyelesaian kredit bermasah 3. Penerapan sistem akuntansi SAKEP pada CBS 4. Implementasi terhadap ketentuan market conduct (perlindungan konsumen)	
2.	Tanggal Rapat	17 April 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan I Tahun 2025 2. Action Plan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA 3. Evaluasi terhadap penerapan APUPPT mengenai dokumen pendukung seperti dokumen Beneficial Owner (BO)	
3.	Tanggal Rapat	11 Juli 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja triwulan II tahun 2025 2. Action Plan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dan AYDA 3. Strategi mengenai pemasaran Kredit dan DPK sehingga bisa mencapai target yang direncanakan 4. Evaluasi mengenai pelaksanaan penerapan market conduct dan APUPPT 5. Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan OJK tahun 2025	
4.	Tanggal Rapat	15 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Topik/Materi Pembahasan: 1. Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan III tahun 2025 2. Strategi dan Progres Penyelesaian Kredit 3. Persiapan dalam menyusun Rencana Bisnis untuk tahun 2026 4. Implementasi penerapan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen 5. Tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan OJK tahun 2025	

Pelaksanaan Rapat diikuti oleh seluruh pengurus BPR Pande baik itu Dewan Komisaris maupun Direksi yang dilaksanakan setiap triwulan

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun		
1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Ni Luh Winari, SE
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	3 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Nyoman Kus Eka Jaya, SE
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Tahun 2025 posisi Dewan Komisaris sudah terpenuhi semua

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris	
Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada	0 kasus

Tahun Sebelumnya	
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Selama periode tahun 2025 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Pande Artha Dewata

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai	
Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian	
Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus

Tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi di tahun 2025

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2025 pada PT. BPR Pande Artha Dewata

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Penjelasan Kegiatan	Dana sosial ini diberikan untuk sumbangan dana kegiatan upacara agama dan kegiatan lainnya dilingkungan BPR Pande
Jumlah (Rp)	Rp700.000

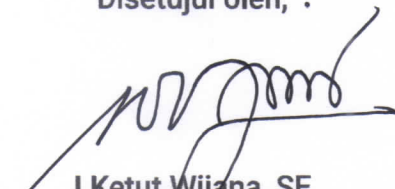
Dana sosial ini diberikan untuk sumbangan dana kegiatan upacara agama dan kegiatan lainnya dilingkungan BPR Pande

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR PANDE ARTHA DEWATA untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Denpasar, 23 April 2026

PT. BPR PANDE ARTHA DEWATA

Disetujui oleh, .


I Ketut Wijana, SE
Direktur Utama



Disiapkan oleh,


I Kadek Edi Suprpta, SE
Direktur YMF Kepatuhan